

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 1, Juli - Desember 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang
Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 1, Juli - Desember 2013

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Hadis Qudsi: Nasihat Allah kepada Para Hamba-Nya	5-6
Pengantar	7-15

SAJIAN KHUSUS

Kelangsungan dan Peningkatan Pembangunan Bangsa dalam Era Reformasi <i>Nurcholish MadjidMadjid</i>	19-33
Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid untuk Pembangunan Bangsa <i>Andi Faisal Bakti</i>	35-49

ARTIKEL

Agama, Konflik, dan Kekerasan <i>Trisno S. Sutanto</i>	53-61
Kebebasan dan Egalitarianisme dalam Teori Rawls <i>Sunaryo</i>	63-83
Tantangan Mendidik Generasi Berkarakter di Abad 21 <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	85-101

DAFTAR ISI

Pengembangan Psikologi Moral dalam Tradisi Sufi: Sebuah Introduksi untuk <i>al-Ri'āyah</i> al-Muhasibi <i>Kautsar Azhari Noer</i>	103-131
Yoga: Cara Meraih Kemenangan <i>Paramahansa Yogananda</i>	133-151

RESENSI BUKU

Menggiatkan Dialog Teologis antara Kristen dan Islam <i>Ursula King</i>	155-157
Mutiara Hikmah Para Kekasih Allah <i>Abmad Fitriyadi</i>	159-164

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	167-168
Ucapan Terima Kasih	169
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	170

KELANGSUNGAN DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN BANGSA DALAM ERA REFORMASI¹

Nurcholish Madjid

Mukadimah

Ucapkanlah,
“Oh Tuhan, Pemilik segala kekuasaan,
Engkau anugerahkan kekuasaan kepada siapa pun yang Kau kehendaki,
dan Engkau copot kekuasaan dari siapa pun yang Kau kehendaki.
Engkau muliakan siapa pun yang Kau kehendaki,
dan Engkau muliakan siapa pun yang Kau kehendaki.
Di tangan-Mulah segala kebaikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²
(Q 3: 26)

Perintah untuk mengucapkan doa itu ditujukan kepada Nabi *saw*. Dan melalui keteladanan Nabi, perintah itu berlaku bagi

¹ Makalah disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina di Jakarta pada 18 September 1998.

²

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

semua kaum beriman. Doa berkenaan dengan masalah kekuasaan, khususnya kekuasaan politik atau kenegaraan (*al-mulk*) itu sering kita dengar dibaca dengan khusyuk oleh kaum Muslim dalam banyak kesempatan.

Tentu dengan maksud amat mendalam bahwa al-Qur'an mengajarkan doa serupa itu, antara lain untuk menyadarkan betapa nisbinya suatu kekuasaan kenegaraan. Tuhan menganugerahkan kekuasaan kepada siapa pun yang dikehendaki, dan mencopotnya dari siapa pun yang dikehendaki. Dengan anugerah kekuasaan itu Tuhan memuliakan kedudukan seseorang, dan dengan mencopot kekuasaan itu Tuhan menjatuhkan martabat seseorang. Sejarah bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita sendiri, menunjukkan adanya kejadian-kejadian dramatis, sebagai bukti kebenaran makna doa ajaran al-Qur'an itu.

Dari doa itu juga dapat diketahui bahwa dalam kekuasaan, sama dengan semua hal, terdapat dimensi ruhani yang sering tidak teramati orang, yang langsung berkaitan dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Karena tidak teramati, dimensi ruhani cenderung terabaikan, dan sedikit saja menjadi pertimbangan bertindak. Misalnya, banyak penguasa terpuakau oleh dimensi jasmani atau lahir kekuasaannya, sehingga menjadi terlengah, untuk kemudian jatuh secara tidak terhormat. Raja Iran Reza Pahlevi adalah seorang penguasa yang memahkotai dirinya sendiri dan isterinya, Farah Diba, dan mengaku sebagai keturunan langsung Raja Darius yang agung. Dengan penuh keangkuhan ia gelari dirinya *Shāhinsyāh Aryāmehr* (Rajadiraja, Cahaya Ras Arya). Dunia Barat memuja dan memujinya, dan ia disebut-sebut sebagai "*the darling of the West.*" Tetapi siapa mengira dia jatuh oleh seorang kiyahi sederhana, Khomaini, kemudian terusir dari negerinya sendiri?! Kekuasaan yang megah dan kekayaan yang gemerlap tidak menolong sedikit pun juga, dan ia pun hidup terlunta-lunta di negeri asing sebagai orang buangan, sampai menemui ajalnya secara kesepian. Lalu untuk apa seluruh hidupnya selama ini? Bukankah semua yang ia jalankan menjadi terasa muspra belaka? Tidakkah semasa berkuasa pernah terbetik dalam hatinya bahwa kekuasaan itu sementara belaka? Ia

mengaku keturunan Nabi *saw* dan menyatakan punya tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sistem masyarakat Islam aliran Syi'ah di Iran. Namun, sebagai seorang Muslim, pernahkah ia membaca al-Qur'an dan merenungi makna firman Allah yang menyuruh Nabi *saw* memanjatkan doa seperti di atas itu?

Mungkin pertanyaan serupa itu terlalu jauh, dan hampir sia-sia, karena siapa saja yang sedang berada pada puncak kemegahan, lupa diri adalah gejala yang amat umum terjadi, sampai akhirnya semuanya terlambat. Dan kekuasaan hanyalah salah satu saja dari banyak wujud kemegahan. Lainnya, yang mudah dikenali, ialah harta kekayaan, tapi mungkin juga kemegahan-kemegahan lain yang sepiantas lalu nampak lunak saja karena bersifat "non-material," seperti prestise-prestise sosial dan kultural.

Bahkan sebenarnya makna ajaran doa di atas itu berlaku berkenaan dengan setiap bentuk kelebihan. Semuanya itu adalah anugerah Allah sebagai amanat yang wajib ditunaikan, sebelum dicopot oleh-Nya dan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan ungkapan lain, dengan doa itu kita dididik menjadi rendah hati, jangan sampai lupa diri.

Dimensi ruhani dalam kekuasaan itu perlu disadari lebih kuat di zaman modern, suatu zaman yang sering disebut sebagai lebih banyak menawarkan kenyamanan lahir daripada kebahagiaan batini. Karena menyangkut hakikat keruhanian, kesadaran itu tidak senantiasa sejajar, apalagi identik, dengan bentuk-bentuk pemenuhan lahir, yang membuat semakin sulit diketahui dan diukur dari luar. Maka dari itu terjadi banyak anomali dalam masyarakat. Banyak penampilan lahir atau formal-simbolik yang mengesankan, bahkan sempat mengecoh banyak orang, sampai akhirnya terbukti tidak punya arti apa-apa, dan semuanya menjadi kecewa.

Perjalanan Pembangunan Bangsa (*Nation Building*)

Dengan titik tolak bahan renungan tersebut, kita akan lihat secara sepiantas dan garis besar perjalanan pembangunan bangsa (*Nation*

Building) di negara kita, untuk dapat memperkirakan kelanjutan apa seharusnya di masa depan. Mula-mula ialah aspirasi kemerdekaan atau, lebih tepatnya, perlawanan terhadap penjajahan. Tahap-tahap awal aspirasi dan perlawanan itu sangat diwarnai oleh semangat Islam, karena adanya dua faktor. Pertama, Islam adalah agama kaum pedagang, sehingga kehadiran orang-orang Barat dengan tujuan perdagangan itu merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi mereka. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, kemudian usaha (yang gagal) oleh Portugis pula untuk merebut Jeddah, merupakan tonggak sejarah ancaman dan persaingan itu. Kedua, konsolidasi sosial-politik Islam di Nusantara, khususnya Jawa, baru dapat dilakukan setelah jatuhnya Majapahit (1478), namun segera harus berhadapan dengan bangsa-bangsa Barat yang datang ke kawasan ini silih berganti. Masyarakat Islam berturut-turut, atau bersamaan, berhadapan dengan orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis. (Jerman yang datang amat terlambat dan hanya bercokol di kawasan timur laut Pulau Irian tidak berdampak apa-apa). Berbagai perang kolonial menggambarkan hal itu semua.

Semangat Islam menitis dalam gerakan nasionalisme modern Sarikat Dagang Islam, yang kemudian berkembang menjadi Sarikat Islam. Dalam gabungannya dengan aspirasi-aspirasi dari kelompok lain seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, khususnya berkat ketokohan Haji Omar Said Tjokroaminoto, telah meletakkan fondasi paling awal pandangan kebangsaan Indonesia.

Dari latar belakang kepribadian, Tjokroaminoto adalah seorang “priyayi” sekaligus “santri” dengan pendidikan Belanda. Jadi, sama halnya dengan banyak gejala sosial di masa-masa itu seperti Budi Utomo, Jong Java, Jong Islamieten Bond (JIB) dan lain-lain, Tjokro dapat dikatakan merupakan contoh akibat tak sengaja (*unintended consequence*) program pendidikan Belanda dalam rangka “politik etis”-nya. Bahkan dialah yang secara amat signifikan tampil sebagai tokoh yang jelas-jelas berwawasan politik yang meliputi seluruh kawasan Nusantara, melewati batas-batas lingkungan kedaerahan dan kesukuan, berbekal kosmopolitanisme Islam dan universalisme pendidikan modern.

Pandangan itu menjadi amat berarti ketika perkembangan sosial-politik Hindia Belanda menginjak tahap pencarian dan pengembangan wawasan tentang sebuah negara merdeka. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa tahap itu ditokohi terutama oleh Bung Karno, seorang *protégé* Tjokroaminoto dan (bekas) menantunya. Bung Karno dan angkatannya yang berpendidikan Belanda menggagasi Indonesia Merdeka sebagai negara kebangsaan modern (*modern nation-state*), dengan rujukan-rujukan kontemporer sesuai zaman dan “mode”-nya.

Gagasan *modern nation-state* itu kemudian benar-benar memperoleh kesempatan untuk diwujudkan setelah Proklamasi. Namun segera ternyata bahwa prasarana sosial-budaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gagasan itu belum terwujud dalam masyarakat. Maka setelah berjalan dua dasawarsa, Bung Karno beserta angkatannya mengalami kesulitan besar, dan secara menyedihkan kiprah mereka harus berakhir dengan malapetaka politik 1965.

Walaupun begitu, perangkat paling dasar bangunan bangsa dan negara, baik yang keras (seperti struktur birokrasi dan ketentaraan) maupun yang lunak (seperti falsafah negara, konstitusi, dan bahasa nasional), telah benar-benar kukuh oleh Bung Karno dan angkatannya. Demikian pula proses-proses *nation building* menuju kepada integrasi bangsa yang utuh juga sudah dirintis dengan mantap.

Tetapi semuanya itu tertunda dalam perkembangannya, terutama akibat-akibat negatif kecenderungan Bung Karno sendiri yang mulai melihat dirinya sebagai yang paling berwenang dan berotoritas. Gaya otoriternya tumbuh tak terkendali melalui megalomaniaknya yang menyukai gelar-gelar hiperbolik seperti gelar “Pemimpin Besar Revolusi” dan gelar-gelar lain dengan predikat serba “Bapak” yang penuh muatan paternalisme dan feodalisme. Suatu ironi, karena sebutan kebanggaannya yang semula, yaitu “Bung,” justru bersemangat egaliter dan kolegiat. Bung Karno pejuang dan proklamator kemerdekaan sempat berubah menjadi Bung Karno “Pemimpin Besar Revolusi” yang sangat mendambakan keagungan pribadi (*personal glory*). Semua itu tidak terwujud,

bahkan Bung Karno akhirnya jatuh *in disgrace*. Hanya waktu dan sejarah yang barangkali akan mengembalikan kepada Bung Karno haknya yang adil dan sah sebagai tokoh utama dari kalangan penggagas dan pendiri negara.

Pak Harto menggantikan Bung Karno sebagai Presiden RI. Lepas dari beberapa kontroversi dan polemik sekitar apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Harto pada saat-saat yang paling awal proses pergantian itu, Presiden kita kedua itu dicatat sebagai tokoh yang berhasil menumpas PKI. Jika hal ini tidak terdengar sangat bermakna bagi sebagian orang sekarang, tapi bagi mereka yang dahulu berjuang untuk demokrasi, khususnya para penentang ide “Nasakom” dan yang tergabung dalam “Liga Demokrasi” (dengan unsur-unsur utama dari Masyumi, PSI, Parkindo dan Partai Katolik), makna penumpasan PKI ialah tersingkirkannya halangan dan ancaman utama usaha mewujudkan demokrasi.

Tapi sayang, Pak Harto justru membuktikan bahwa penumpasan PKI tidak berarti otomatis peluang bagi demokrasi. Pada tahap perkembangan ini segera muncul persepsi sosial-politik yang tidak kurang anti-demokratisnya, khususnya dalam pandangan kaum demokrat dari Masyumi-PSI. Mereka ini kemudian mengalami penyempitan partisipasi politik (misalnya, koran-koran mereka, yaitu *Abadi* dan *Pedoman*, dilarang), dan stigma sebagai “ekstrem kanan” — sebuah padanan kutukan politik atas PKI sebagai “ekstrem kiri” — dikenakan pada mereka. Dalam gabungannya dengan kepentingan-kepentingan berbagai kelompok dan golongan yang sama-sama menghendaki terhambatnya demokrasi, stigma politik “ekstrem kanan” menjadi momok paling menakutkan dalam masa-masa permulaan Orde Baru.

Penghambatan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi sebagai kemestian *modern nation-state* menjadi sempurna oleh pilihan tak terelakkan untuk menempuh jalan pragmatis karena prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Pilihan itu sendiri punya logika, yaitu mendesaknya keharusan mengatasi kemiskinan bangsa yang mencekam dan hampir tidak masuk akal (negara

dengan sumber daya alam terkaya ketiga di dunia namun rakyatnya hidup miskin-papa). Dikelilingi oleh para teknokrat yang tergabung dalam suatu kelompok hampir imajiner dengan ledakan “Berkeley Mafia,” Pak Harto memimpin pembangunan ekonomi dan berhasil melipatgandakan *GNP per capita* bangsa. Dengan kemakmuran nisbi itu bangsa Indonesia juga mengalami peningkatan kesejahteraan di bidang-bidang lain, khususnya pendidikan.

Baik secara nasional maupun internasional, keberhasilan pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya stabilitas dan keamanan. Dengan dukungan berbagai pihak di luar negeri, Pak Harto mewujudkan kedua persyaratan itu, dan istilah “stabilitas dan keamanan,” ditambah istilah “demi persatuan dan kesatuan” menjadi logo perpolitikan nasional yang sangat bersayap. Dengan cara pendekatan masalah politik penuh rahasia dan kejutan atau dadakan (seperti layaknya tentara yang menyerbu musuh), Pak Harto berhasil berkuasa secara efektif selama tigapuluh dua tahun.

Pak Harto akhirnya jatuh, sebagai korban kesuksesannya sendiri. Ia telah berhasil meningkatkan kemakmuran nisbi rakyatnya, dan menyediakan pendidikan terjangkau masyarakat luas dengan mutu dan jenjang semakin tinggi. Namun ia nampaknya tidak mampu menduga sebelumnya bahwa semua itu memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial-politik yang amat mendasar. Yaitu kesadaran umum rakyat tentang hak-hak mereka, dan kemampuan mengartikulasikan tuntutan akan hak-hak itu. Kemakmuran dan keterpelajaran nisbi membuat masyarakat semakin “rebut” (yang dari sudut pandang kehidupan demokratis justru bernilai sangat positif).

Kesuksesan Pak Harto juga telah membuatnya lengah, sehingga lupa menarik pelajaran dari apa yang telah terjadi pada Bung Karno. Pak Harto mulai merasa dirinya tak tersaingi, bahkan tak tersentuh, dan perasaan itu agaknya ia perluas untuk meliputi putra-putrinya. Secara kolektif mereka itu semua merasa dapat berbuat apa saja tanpa kuatir kepada siapa pun juga. Di sini mulai terlihat beberapa “*blind spots*” Pak Harto yang menjerumuskannya kepada pelanggaran etika dan moral *modern nation-state*. Tidak seperti

Bung Karno yang jatuh terutama alasan ideologis (dinilai terlalu dekat dengan PKI) dengan bumbu moralitas pribadi (semacam yang dialami Presiden Clinton saat itu), Pak Harto jatuh terutama karena alasan *civic morality*, khususnya berupa berbagai penyelewengan dalam akronim KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Di samping itu, alasan kejatuhan Pak Harto yang lebih mendasar ialah kegagalannya memahami dan melaksanakan ide *modern nation-state* atau negara kebangsaan modern. Sama dengan Bung Karno, ternyata Pak Harto juga nampak menikmati "*personal glory*." Padahal gagasan yang paling asasi dalam pengertian negara kebangsaan modern ialah terbentuknya sebuah negara yang tidak menjadi sarana pengagungan penguasa seperti dalam kerajaan kuna. Negara kebangsaan modern adalah prasarana untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh "anggota bangsa," yakni rakyat, dengan ciri utama keadilan dan pemerataan, persis seperti salah satu prinsip kenegaraan yang dinyatakan dalam Mukaddimah UUD 45. Karena itu, dalam sebuah negara kebangsaan modern, masyarakat tidak memandang seorang pemimpin dengan sikap penuh pengagungan (*heraldic*). Pemimpin hanyalah seorang tokoh "pertama di antara yang sama" (*primus inter pares*), semata-mata karena adanya tanggung jawab formal yang dipercayakan kepadanya. Ia selamanya harus menyadari segi tanggung jawab formal itu, sehingga tidak akan sempat memandang bahwa kekuasaan, pengaruh, gengsi, prestise, penghargaan, bahkan hadiah-hadiah, adalah berkat dirinya sendiri. Semua itu adalah tidak lain berkat adanya kedudukan sebagai akibat langsung adanya tanggung jawab formal tersebut, sehingga harus dinisbatkan atau dikembalikan kepada negara.

Perbandingan lebih lanjut Bung Karno dan Pak Harto menunjukkan perbedaan yang amat penting dalam masalah keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Bung Karno, dengan dikitari tokoh-tokoh keadilan sosial seperti Bung Hatta dan Syahrir, nampaknya dari semula berkomitmen kepada usaha mewujudkan keadilan itu. Tidak ada suatu golongan sosial-ekonomi yang diunggulkan atas yang lain, dan kewirausahaan atau *entrepreneurship* tumbuh

dalam masyarakat tanpa hak-hak istimewa yang berlebihan. Dan bagi semua golongan (di sini harus disebutkan, termasuk golongan etnis China) diakui hak-hak sipil mereka. Bentuk-bentuk hambatan dalam hubungan antar kelompok dan etnis, baik vertikal seperti keagamaan, maupun horizontal seperti kedaerahan, tentu terjadi tanpa sepenuhnya dihindari. Namun semuanya itu lebih merupakan akibat wajar proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa yang belum semuanya selesai dengan sempurna.

Saat pemerintahan Bung Karno, hanya PKI yang mempunyai agenda politik-ekonomi eksklusif dengan akibat kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin parah (suatu ironi bagi sebuah partai Marxis). Partai Marxis-Leninis itu punya obsesi untuk menghancurkan dunia wirausaha pribumi yang kebetulan hampir secara keseluruhan menjadi pendukung Masyumi, musuh bebuyutan mereka. Dan sementara menghancurkan dunia wirausaha pribumi, secara tidak wajar, PKI melindungi dunia wirausaha etnis China yang kapitalistis (suatu ironi lagi), agaknya sebagai tuntutan logis adanya “poros Jakarta-Peking,” tetapi juga jelas sebagai sumber dana kegiatan (khususnya lewat Baperki).

Mungkin tanpa disadari sepenuhnya atau barangkali atas pertimbangan yang belum diketahui, Pak Harto langsung atau tidak langsung melanjutkan agenda menghancurkan dunia wirausaha pribumi. Sudah sejak semula proses pembangunan ekonomi pimpinan Pak Harto mengundang kontroversi dan polemik berkenaan dengan masalah keadilan dan pemerataan yang harus diwujudkan secara simultan dengan proses pembangunan ekonomi itu sendiri, pemerintahan Pak Harto sering tampil dengan argumen bahwa yang penting ialah “memperbesar kue” untuk kemudian kelak dibagi secara adil dan merata. Kadang-kadang terdengar argumen bahwa dengan memperbesar kue itu secepat mungkin, pembangunan ekonomi mengharuskan pemerintah mengikuti kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembangunan ekonomi sektor swasta kepada mereka yang “kompetitif” dan secara “obyektif” mempunyai kemampuan yang handal (termasuk penilaian “*bankability*”). Hal itu berarti menjatuhkan pilihan kepada para

pelaku ekonomi dari kalangan warga masyarakat keturunan China, karena merekalah yang sampai saat itu memenuhi kriteria sebagai yang “kompetitif” dan secara “obyektif” berkemampuan. Dengan latar belakang jiwa kewirausahaan dalam sejarah yang panjang, mereka terbukti menunjukkan kemampuan yang luar biasa, dengan saham pembangunan nasional yang jauh di atas proporsinya secara berlipat ganda, sedemikian rupa sehingga terjadi keganjilan besar bahwa empat persen warga masyarakat menguasai tujuh puluh persen ekonomi nasional.

Dengan sendirinya kebijakan pemerintah Pak Harto itu mengalienasi banyak sekali golongan lain. Perasaan tidak adanya keadilan dalam pembagian “kue nasional” sedemikian kuatnya terpendam dalam kalangan luas masyarakat. Letupan-letupan gejolak sosial yang telah terjadi sudah dengan jelas menunjukkan indikasi adanya kejengkelan yang tersumbat itu. Dan seolah-olah merupakan kemestian berlakunya hukum besi dalam persaingan bebas, kebijakan “obyektif” pemerintah di bidang ekonomi telah menjerumuskan masyarakat ke dalam “Darwinisme ekonomi.” Pihak yang kuat dan memiliki persyaratan untuk bertahan hidup (*survive*) menjadi semakin lemah untuk kemudian hancur. (Sebagaimana banyak terdengar dalam masyarakat, dalam pertimbangan apapun, sama sekali tidak adil bahwa ada empat persen warga negara yang menguasai tujuh puluh persen ekonomi nasional). Isyarat-isyarat telah bermunculan, tapi kebanyakan kita tidak mampu menangkapnya.

Pembangunan Bangsa dalam Era Reformasi

Secara ironis sekali, semua kekecewaan di atas berakumulasi dengan faktor-faktor hak sipil etnis China yang diingkari selaku warga negara, sekalipun di bidang ekonomi mereka diberi peluang yang tiada taranya, kapan pun dan di mana pun. Tumpukan mesiu itu meledak dengan dahsyat dan membentuk bagian fenomenal

dalam peristiwa lahirnya “Era Reformasi.” Berbagai kezaliman telah pula berlangsung, dan sangat menjatuhkan martabat bangsa. Tetapi, seperti halnya dalam semua peristiwa sebab-akibat yang ruwet, dalam menilai kejadian yang mengesankan di bulan Mei 1998 itu, kita melompat kepada kesimpulan yang gampang tidak akan menyelesaikan persoalan. Semua perlu perspektif yang lebih dalam.

Sepanjang mengenai aspirasi dasarnya, gerakan reformasi jelas sekali menghendaki pembangunan bangsa atau *nation building* dengan lebih dahulu diakhirinya berbagai kebijakan yang membawa malapetaka tersebut, dan dimulai dengan sungguh-sungguh mewujudkan wawasan negara kebangsaan modern. Jika coba ringkaskan berbagai aspirasi dan keinginan dalam wacana umum, kita sampai kepada nuktah-nuktah yang kurang lebih berkisar sekitar hal-hal berikut:

- 1) Mutlak diperlukan langkah-langkah kebijakan mendesak untuk mengatasi krisis ekonomi, setidaknya berupa “*social safety net.*”
- 2) Karena krisis ekonomi saat ini berdimensi regional, bahkan global, maka dituntut kemampuan pemerintah untuk mengkomunikasikan permasalahannya dan menyadarkan rakyat bahwa usaha penanggulangan krisis itu di negara kita terkait erat dengan usaha serupa di negara-negara lain.
- 3) Oleh karena itu ada dimensi waktu yang tidak pendek, dan perlu dibina ketahanan ekonomi nasional dalam rangka ekonomi global.
- 4) Sementara itu, parahnya krisis ekonomi negara kita — lebih parah daripada di negara-negara tetangga — adalah akibat kebijakan yang menghasilkan “*bubble economics.*” Maka pemerintah harus berkemampuan komunikatif untuk mengajak seluruh rakyat menyadari kenyataan baru, yaitu bahwa kita sebenarnya adalah masih sebuah negara miskin, yang menuntut keprihatinan dan kerja keras semua warga.

- 5) Guna menopang itu semua, proses demokratisasi sebagai kemestian sebuah negara kebangsaan modern harus dipacu dengan penuh kesungguhan dan konsistensi. Kepada seluruh warga negara harus ditanamkan kesadaran demokrasi sebagai pandangan hidup yang meliputi kedewasaan menyatakan pendapat secara bebas dan kesediaan menerima adanya perbedaan pendapat dan kemungkinan mencari titik temu antara berbagai golongan.
- 6) Karena itu diperlukan pendidikan politik umum untuk membiasakan dan melatih semua pihak menyelesaikan perbedaan pendapat dalam semangat keadaban (*civility*) dan tidak mudah bersandar kepada kekerasan.
- 7) Maka secara nasional harus ada pengakuan hak penuh dan peranan partai oposisi. Bersama dengan kebebasan pers dan fungsi legislatif yang benar-benar bebas, partai oposisi adalah jaminan struktural bagi pengawasan sosial, transparansi dan keterbukaan.
- 8) Keadaban atau *civility* juga mutlak diperlukan guna mendukung prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme, yaitu kesediaan melibatkan diri dalam kemajemukan dengan sikap saling menghormati.
- 9) Dengan semua prinsip itulah terkait ide tentang masyarakat madani atau *civil society*, salah satu perwujudan utama aspirasi reformasi. Perkataan “madani” atau “civil” itu sendiri sudah menunjukkan dimensi keadaban, yang dalam perkataan “madani” juga terkandung makna kemestian tunduk kepada hukum dan aturan.
- 10) Jadi tersangkut pula mutlaknya ditegakkan tertib hukum dan ketaatan kepada aturan. Hukum dan aturan yang diakui bersama adalah hasil “kontrak” atau “perjanjian” antara para warga. Karena itu negara sendiri, menurut al-Mawardi, adalah hasil adanya “kontrak” (*‘aqd* — عقد) atau “perjanjian” (*‘ahd* — عهد) para warga masyarakat (seperti terpantul dalam teori Rousseau tentang negara sebagai “kontrak social”). Al-Qur’an memuat perintah agar kita menepati perjanjian

Allah setiap kali kita membuat perjanjian dengan sesama manusia, suatu isyarat bahwa perjanjian yang sah antara sesama manusia adalah senilai dengan perjanjian Allah (Q 16: 91).³

- 11) Kerangka dasar demokrasi ialah kebebasan asasi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Juga penting sekali dijaga kebebasan dari rasa takut. Karena semua itu adalah kategori dinamis, maka perwujudannya menyatu dengan “pengalaman” (maksudnya, harus dialami sendiri secara nyata untuk dapat diketahui dan dihayati makna dan hakikatnya). Masyarakat harus diberi keleluasaan secukupnya untuk “mengalami” itu semua, sekaligus guna menumbuhkan kesadaran yang mantap tentang rasa tanggung jawab, agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan.
- 12) Bersangkutan erat dengan hal di atas ialah hak asasi manusia. Dalam masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa masalah dan prinsip hak asasi adalah universal, sekalipun perwujudan kongkretnya dapat mempunyai bentuk ekspresi lokal.
- 13) Hak asasi manusia melibatkan pengakuan dan pemberian hak-hak sipil yang sah kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi. Masalah kestabilan dan keamanan nasional harus diciptakan begitu rupa sehingga tidak melanggar hak asasi dan meniadakan hak-hak sipil warga negara.
- 14) Terakhir ialah pendidikan. Dapat dikata, sama dengan agenda pembangunan bangsa atau *nation building* yang telah tertunda beberapa dasawarsa, kesadaran tentang nilai sentralnya pendidikan juga tertunda sekian lamanya. Pengalaman

3

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

semua bangsa menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan pemerataannya adalah sendi utama kemajuan negara.

Penutup

Seperti baru saja kita saksikan sendiri beberapa bulan yang lalu, semua proses perubahan besar masyarakat selalu didahului dengan adanya semacam fragmentasi sosial. Tahap selanjutnya ialah tumbuhnya dorongan meluap-luap untuk ambil bagian atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Dan jika laju perubahan berjalan tidak terlalu mujur, individualisme, bahkan egoisme, mungkin saja menggejala dengan kuat, sehingga integrasi nasional yang amat diperlukan bagi suksesnya reformasi akan terganggu, atau bahkan berantakan.

Berkenaan dengan tahap logis pembangunan bangsa atau *nation building* setelah reformasi, dari pembahasan di atas dapat diringkaskan bahwa kita perlu kembali kepada usaha sungguh-sungguh melaksanakan wawasan negara kebangsaan modern (*modern nation-state*) sebagaimana telah dirintis dan diletakkan dasar-dasarnya oleh para tokoh pendiri negara. Pelaksanaan itu memerlukan partisipasi yang tulus dari semua warga negara, dan partisipasi yang terakhir itu, paling berharga ialah rasa ikut punya negara, ikut bersaham, dan ikut bertanggung jawab menjaga dan mengembangkannya.

Di atas semuanya diperlukan kepemimpinan yang otentik, baik dari segi wawasan kenegaraannya maupun, lebih-lebih lagi, dari segi komitmen moral kemasyarakatan atau "*civic morality*"-nya. Tanpa kepemimpinan yang otentik itu, komunikasi politik vertikal dan horizontal akan tidak efektif atau bahkan macet, sehingga seruan membangun kembali ekonomi nasional dengan ajakan keprihatinan dan pengorbanan umum tidak akan mendapatkan sambutan yang diperlukan. Padahal nuktah terakhir itu, dari sedikit hal yang tersisa

untuk dapat dilaksanakan dalam situasi krisis yang dahsyat ini, adalah mungkin justru yang paling pokok.

Kembali kepada semangat makna doa yang diajarkan Allah kepada Nabi *saw* di atas, dalam usaha mengatasi krisis nasional ini hendaknya kita tidak berhenti hanya kepada gejala kasat mata, yaitu segi fisik yang dapat dinyatakan dalam angka dan statistik belaka. Di balik itu ada masalah yang lebih “cair” (*fluid*), yaitu psikologi politik, yang berkaitan dengan masalah kepercayaan kepada pemerintah. Dan, mengatasi segala-galanya, ada faktor ruhani sekalipun tidak bisa diterangkan (*ineffable*), namun sesungguhnya amat nyata dengan dampak yang dahsyat, karena berkaitan dengan kehendak Yang Maha Kuasa, yang di tangan-Nya terletak segala kebaikan. Kita harus menaruh kepercayaan (beriman) dan bersandar (bertawakkal) dengan penuh ridla kepada Allah.

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. ❖